INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2024

Jl. Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313 Prov. Jawa Tengah
Telp./ Faks. (0284) 321254

inspektorat_pemalang inspektorat.pemalangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditatapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran penjabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang, 12 Februari 2025

INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 005

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

- ✓ Capaian sasaran strategis 1 : "*Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel*"
  - Capaian sasaran strategis 1 ditentukan dengan indikator kinerja Maturitas SPIP yang diperoleh dari penilaian BPKP Perwakilan Jawa Tengah Tahun 2024.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
  - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 3,0395. Pada akhir Desember 2024 telah dirilis resmi hasil penilaian dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan skor penilaian sebesar 2,935 atau capaian sebesar 96% .

  Terhadap capaian kinerja sasaran strategis 1, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :
  - Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko.
  - Meminimalisir terjadinya temuan berulang atas pemeriksaaan BPK.
- ✓ Capaian sasaran strategis 2 : "*Meningkatnya kualitas hasil pengawasan*"
  - Capaian sasaran strategis 2 ditentukan dengan indikator kinerja Kapabilitas APIP yang diperoleh dari penilaian Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Tahun 2024.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja dari 3 (tiga) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan Dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
  - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah 'Level 3', sampai dengan bulan Desember 2024 dapat terealisasi di 'Level 3'. Dengan demikian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 di 'Level 2', maka terdapat peningkatan sebesar 33%.
- Terhadap capaian kinerja sasaran strategis 2, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan komunikasi dengan internal APIP
2. Meningkatkan partisipasi aktif APIP bersama manajemen Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain yang membutuhkan saran dan penjaminan

✓ Capaian sasaran strategis 3 : "*Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan*"

Capaian sasaran strategis 3 memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan nilai Akuntabilitas Kinerja.

- Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Inspektorat. Capaian indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun target indikator tersebut di tahun 2024 ditetapkan dengan indeks sebesar 81, dengan capaian indeks hingga Desember 2024 adalah sebesar 82,20. Dengan demikian, target kinerja kepuasan masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Pemalang dapat tercapai, dengan capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 80,032, maka terdapat peningkatan indeks sebesar 0,97. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :
  - Waktu dan pelayanan, terkait kegiatan pendampingan, konsultasi dan pengaduan masyarakat
  - Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pelayanan
- Indikator nilai Akuntabilitas Kinerja diperoleh melalui hasil penilaian/evaluasi dari APIP terhadap kinerja perangkat daerah. Capaian indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun target indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 ditetapkan dengan nilai sebesar 65, dengan capaian indikator hingga Desember 2024

adalah sebesar 65,43. Dengan demikian, target Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tercapai, dengan capaian sebesar 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 64,85, maka terdapat peningkatan sebesar 0,58. Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

- ketepatan waktu dalam hal penyampaian laporan
- perubahan budaya kerja organisasi ke arah yang lebih baik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 5

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR GAMBAR 7

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1 Latar Belakang 8
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 9
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 10
1.2.2 Anggaran 13
1.3 Dasar Hukum 13
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1 Capaian Kinerja 22
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 23
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 23
3.1.3 Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 24
3.1.4 Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 27
3.1.5 Membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 29
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 31
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 32
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja. 33
3.2 Realisasi Anggaran 36

BAB IV PENUTUP 38

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 13
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 17
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 18
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah 19
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 20
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah 20
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 23
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 24
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 27
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota 29
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 32
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 32
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 34
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pemalang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan

pada perjanjian Kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Inspektorat Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas mengacu pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Perbup tersebut, Inspektorat Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selain itu Inspektorat Kabupaten Pemalang juga melaksanakan fungsinya yaitu :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku APIP untuk melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pada tahapan kegiatan:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

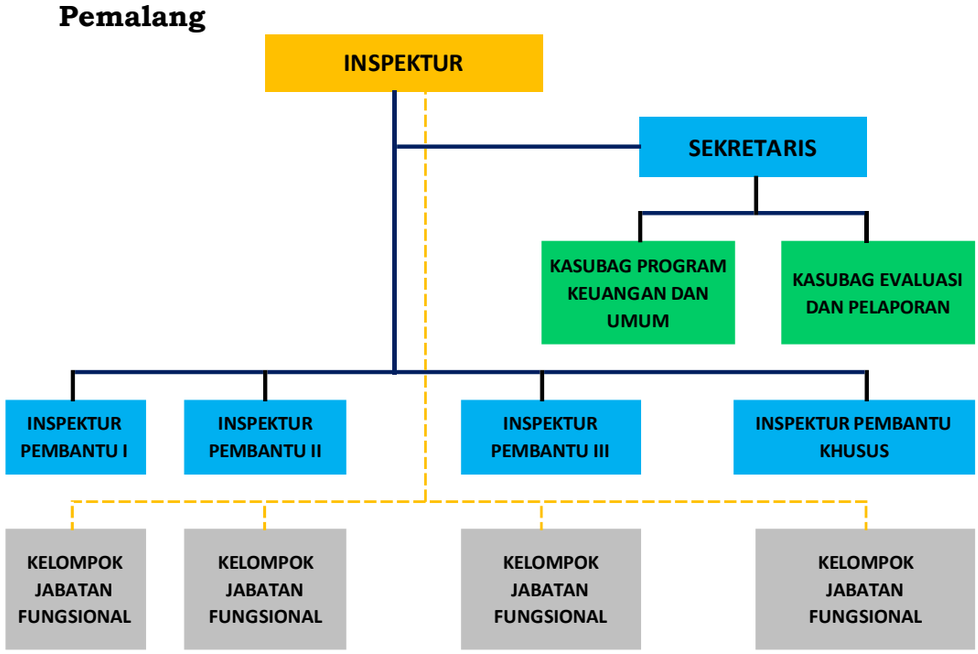
b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan secara sistematis melalui penetapan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pemalang dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pemalang.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang



Sumber : *Perbup Pemalang No.3 Tahun 2023*

Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat
   a. Tugas

      Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

   b. Fungsi
      - pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
      - pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
      - pelaksanaan pengelolaan keuangan;
      - pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
      - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Subbagian

   Subbagian Program, Keuangan dan Umum dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangnya.
4. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten terbagi dalam kelompok sesuai sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional yang terdapat di Inspektorat Kabupaten Pemalang diantaranya :

a. Auditor

   Inspektorat Kabupaten Pemalang memiliki 18 orang Auditor, terdiri dari 2 orang Auditor Madya, 4 orang Auditor Muda, 8 orang Auditor Pertama, 2 orang Auditor Penyelia dan 2 orang Auditor Terampil.

b. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

   Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Pemalang seluruhnya berjumlah 7 orang yang terdiri dari 3 orang Ahli Madya dan 4 orang Ahli Muda.

c. Perencana

   Fungsional Perencana yang ada berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Perencana Ahli Muda

d. Pranata Komputer

   Pranata Komputer hanya ada 1 (satu) orang yaitu Pranata Komputer Terampil

1.2.2 Anggaran

Sumber keuangan atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Inspektorat Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.167.463.000. Anggaran tersebut meliputi :

▪ Gaji	Rp 7.517 463.000	(70%)
▪ Operasional Rutin Kantor	Rp 2.174.838.000	(14%)
▪ Pengawasan	Rp 1.599.156.235	(10%)
▪ Pendampingan/Asistensi	Rp 1.052.472.000	(6%)
	Rp 15.167.463.000	**(100%)**

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp 13.340.434.000
APBD	2024	Rp 15.167.463.000
SumberLainnya (Jika Ada)	-	-

Sumber : Sub Bag PKU Inspektorat Pemalang

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;.
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan 2024
2 LHE AKIP Inspektorat 2024
3 TL LHE AKIP Inspektorat 2024
4 Review LKjIP 2023
5 Revisi LKjIP 2023
6 Matriks Renstra Inspektorat 2021-2026
7 Matriks Renja Perubahan 2024
8 Pohon Kinerja
9 Cascading
10 Review LKjIP 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Perangkat Daerah

Renstra yang digunakan sebagai rujukan pada tahun 2024 yaitu Renstra Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra tersebut selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kabupaten Pemalang untuk tahun berjalan dan 1 tahun kedepan juga memuat perubahan Indikator Kinerja Utama. Berikut outline Renstra Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

A. Visi

Visi Kabupaten Pemalang adalah “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

B. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1) Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3) Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4) Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5) Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

C. Tujuan

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Pemalang mendukung misi kedua yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa : (1) meningkatnya birokrasi akuntabel, (2) meningkatnya birokrasi kapabel; dan (3) meningkatnya pelayanan publik yang prima. Inspektorat Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya sasaran daerah meningkatnya birokrasi akuntabel dengan indikator kinerja Management Risk Indeks (MRI).

Adapun tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang yaitu terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Guna mewujudkan kinerja yang telah disepakati, maka Inspektorat Kabupaten Pemalang telah merumuskan indikator Kinerja, target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	3,0380	3,0385	3,0390	3,0395	3,0400	3,0405
2.		Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3
3.		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	78	79	80	81	82	83
			Nilai komponen AkuntKinerja	59,86	60	61,07	61,68	62,29	62,92

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	skor	Penilaian kematangan SPIP untuk mengetahui seberapa baik SPIP dalam mencapai tujuannya	Hasil Evaluasi dari BPKP	BPKP Jawa Tengah
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	level	Penilaian kemampuan APIP atas pengawasan yang berkualitas	Hasil Evaluasi dari BPKP	BPKP Jawa Tengah
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Inspektorat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sub Bag PKU Inspektorat
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Penilaian/evaluasi dari APIP terhadap kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi dari Evaluator Inspektorat	Evaluator Inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja 2024 Inspektorat Kab. Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	skor	3,0395
2.		Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	level	3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	81
			Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	Nilai	61,68

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Inspektur Kabupaten Pemalang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang
Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	3,0395
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	81
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	65

Sumber :Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	11.271.761.000
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.630.440.000
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	979.992.000

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.5
Program Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Sasaran Startegis Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai AKIP Nilai Indeks RB	65 41
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pengadaan Mebel		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

No.	Sasaran Startegis Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerjasama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	90%
3.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan **Pendampingan dan Asistensi** Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan pendampingan dan asistensi	85%

Sumber *: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2024*

Pada tanggal 23 September 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	3,0395
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	81
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	65

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.515.834.765
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.599.156.235
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.052.472.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Pemalang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	3,0395	2,935	96	Sangat Tinggi	BPKP Jawa Tengah
2	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3	3	100	Sangat Tinggi	BPKP Jawa Tengah
3	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	81	82,20	100	Sangat Tinggi	Sub Bag PKU Inspektorat Pml
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	64,90	65,43	100	Sangat Tinggi	Evaluator APIP Pml

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja “Maturitas SPIP” mencapai realisasi 2,935 dari target 3,0395 atau sebesar 96%. Dengan pencapaian tersebut, hasil kinerja ini diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan kontribusi pada peningkatan capaian kinerja Maturitas SPIP, meskipun implementasinya belum secara menyeluruh dan konsisten.
2. Indikator Kinerja “Kapabilitas APIP” mencapai realisasi di Level 3 dari target Level 3, dengan persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Dalam penilaian BPKP, APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang dianggap telah mengimplementasikan 6 (enam) elemen pengawasan secara baik dan terus menerus.
3. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi skor sebesar 82,20 dari target skor 81, dengan persentase capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut diklasifikasikan dalam kategori “Sangat Tinggi”. Penanganan pengaduan masyarakat yang optimal tanpa menerapkan tarif menjadi andalan tercapainya indikator kinerja kepuasan masyarakat.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam	Maturitas SPIP	3,0375	2,430	3,0395	2,935	96

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel						
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	2	2	3	3	100
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,065	80,032	81	82,20	100
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	63,35	64,85	65	65,43	100

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, tingkat capaian per indikator dapat dijabarkan dalam uraian berikut :

1. Sasaran Strategis "*Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel*" diukur dengan indikator 'Maturitas SPIP' Realisasi kinerja tahun 2022 untuk indikator tersebut tercatat sebesar 3,0375, terlihat sedikit lebih rendah dari targetnya sebesar 3,380. Memasuki tahun 2023, realisasi kinerja menurun menjadi 2,430. Penurunan kinerja tersebut menunjukkan bahwa masih dijumpai adanya kelemahan pada praktek pengendalian intern yang belum ditangani secara memadai. Pada akhir 2024, ada peningkatan realisasi kinerja menjadi 2,935, meskipun capaian tersebut belum memenuhi target. Kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan kontribusi pada peningkatan capaian kinerja ini, meskipun implementasinya belum secara menyeluruh dan konsisten.
2. Sasaran Strategis "*Meningkatnya kualitas hasil* pengawasan" yang diukur dengan indikator 'Kapabilitas APIP', pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat mencapai target Level 3. Memasuki tahun 2024, realisasi kinerja Kapabilitas APIP meningkat sesuai target di Level 3. Pencapaian realisasi Level

3 mencerminkan adanya upaya perbaikan dari APIP untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pengawasan ditengah berbagai kendala yang dihadapi. Dengan demikian, pencapaian Level 3 menunjukkan kemampuan APIP dalam melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Penting untuk terus memantau indikator ini agar capaian Kapabilitas APIP dapat ditingkatkan ke level berikutnya guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*).

3. Sasaran Strategis "*Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan*" diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

   a). Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

   Realisasi indikator kinerja ini dapat melampaui target di tahun 2022 dan 2023. Nilai realisasi indikator ini relatif stabil disetiap tahunnya. Memasuki tahun 2024, indikator kinerja ini mampu melampaui target. Hal ini mencerminkan komitmen Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk berupaya mempertahankan mutu pelayanan publik. Penting untuk terus memantau indikator ini untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Pemalang.

   b). Nilai Akuntabilitas Kinerja

   Realisasi indikator kinerja ini dapat melampaui target di tahun 2022 dan 2023. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kabupaten Pemalang mengalami tren peningkatan disetiap tahunnya dan tetap mampu melampaui target pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP pada Inspektorat Kabupaten Pemalang sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk perangkat daerah. Dengan

demikian, meningkatnya nilai AKIP mencerminkan adanya komitmen dari pimpinan organisasi untuk menjaga sinergitas antar unit kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Penting untuk terus memantau indikator ini demi perbaikan manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Pemalang periode 2021-2026, diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	2,935	3,0405	96
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3	3	100
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	82,20	83	99
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	65,43	62,92	103

Sumber : *Sub bag PKU - Inspektorat Pemalang*

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, maka perbandingan realisasi kinerja dijabarkan dalam uraian berikut:

1. Realisasi kinerja Maturitas SPIP tahun 2024 adalah 2,935. Dengan target akhir Renstra sebesar 3,0405, maka tingkat

kemajuan yang dicapai adalah sebesar 96%. Data ini menunjukkan bahwa kinerja Maturitas SPIP masih dapat ditingkatkan untuk mencapai target pada tahun 2026.

2. Realisasi kinerja Kapabilitas APIP tahun 2024 adalah Level 3. Dengan target akhir Renstra pada Level 3, maka tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 100%. Data ini menunjukkan bahwa kinerja Kapabilitas APIP dapat diharapkan untuk bertahan di Level 3 hingga 2026.
3. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 tercatat sebesar 82,20. Dengan target akhir Renstra sebesar 83, maka tingkat kemajuan yang diperoleh telah mencapai 99%. Data ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat optimis dapat mencapai target pada 2026.
4. Realisasi kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 adalah tercatat sebesar 65,43. Dengan target akhir Renstra sebesar 62,92, maka tingkat kemajuan yang diperoleh telah melampaui angka 100%. Data ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Inspektorat harus dipertahankan performanya agar tetap mampu melampaui target pada 2026.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Melaksanakan pendampingan SPIP ke setiap OPD dalam rangka penilaian mandiri maturitas SPIP.
2. Melaksanakan pendampingan manajemen risiko ke setiap OPD.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM APIP melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
4. Melaksanakan telaah sejawat antar APIP dan antar Inspektur Pembantu.
5. Peningkatan sarana dan prasarana.
6. Peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan publik

7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan efektifitas kinerja.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi PD Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	2,935	-	-	3,00 (Kota Pekalongan) 3,067 (Purbalingga) 3,317 (tertinggi/Purworejo)	-
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3	-	3	3 (Kota Pekalongan) 3 (Purbalingga)	-
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	82,20	-	88,5 (Itprov 2023) 92 (Prov. Jtg 2023)	88,67 (Itda Cilacap)	90,02 (Capil) 89,30 (PTSP)-
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	65,43	-	-	-	68,29 (Bappeda) 67,22 (Setwan)

Sumber : *berbagai sumber*

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dinarasikan secara singkat terkait perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 antara capaian yang telah diraih Inspektorat Kabupaten Pemalang bila dibandingkan dengan instansi lainnya:

1. Realisasi kinerja Maturitas SPIP yang dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah yang terendah dilingkup Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024. Bila dibandingkan dengan nilai tertinggi sebesar 3,317 (Kab. Purworejo), maka terdapat selisih yang cukup banyak. Sedangkan bila

dibandingkan dengan nilai rata-rata di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,00, maka selisihnya tidak terpaut banyak.

2. Realisasi kinerja Kapabilitas APIP yang dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang mampu menyamai kinerja dari Inspektorat daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas APIP Pemalang setara dengan APIP daerah lain secara umum.
3. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat masih jauh dari kinerja di level Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga bila dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, capaian kinerja IKM Inspektorat terpaut jauh di bawahnya. Hal ini menunjukkan masih banyak yang perlu ditingkatkan dari kinerja pelayanan publik Inspektorat Kabupaten Pemalang. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain :
   - meningkatkan kompetensi SDM untuk penyelesaian pengaduan masyarakat
   - menambah sarana dan prasarana penunjang pelayanan
4. Realisasi kinerja Akuntabilitas Kinerja yang dicapai Inspektorat Kabupaten Pemalang menempati peringkat 13 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Suatu kondisi yang menggambarkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pimpinan. Langkah yang diupayakan untuk peningkatan tersebut yaitu dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	3,0395	2,935	96	Penerapan manajemen resiko	Pendampingan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan RTP dan efektifitasnya pada unit kerja
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	3	3	100	Sinergitas pengawas/ pemeriksa	Pengiriman diklat bagi SDM pengawas/pemeriksa dan penambahan SDM pengawas/ pemeriksa
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	81	82,20	100	Ketepatan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat	– Peningkatan sarpras – Pembinaan SDM
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	65	65,43	100	Komitmen pimpinan	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP

Sumber : *diolah dari berbagai sumber*

Dari gambaran tabel di atas, 3 dari 4 indikator kinerja memiliki capaian 100%. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan capaian, antara lain sinergitas pengawas dan pemeriksa, ketepatan penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan komitmen pimpinan.

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran
Serta Efesiensi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	3,0395	2,935	96	890.520.000	774.556.499	86,98	13,02
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	3	3	100%	2.235.739.575	1.757.356.300	78	22
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	81	82,20	100%	12.515.834.765	11.807.769.967	94,34	5,66
		65	65,43	100%				

Sumber : *Sub bag PKU Inspektorat Pemalang*

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan/Sasaran "Meningkatnya kualitas hasil pengawasan" menyumbangkan efisiensi terbanyak. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena penugasan audit kerugian negara yang diselesaikan tidak banyak memerlukan tinjauan lapangan ke lokasi obyek pemeriksaan, sehingga efisiensi perjalanan dinas dapat diterapkan.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya Pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPIP	96	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	90,31	Menunjang	Telah sesuai tujuan dan sasaran yang mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penilaian maturitas SPIP
2.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Kapabilitas APIP	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun	78,36	Menunjang	Telah sesuai tujuan dan sasaran yang mendukung peningkatan Kapabilitas APIP
				Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang terselenggara	85,59	Menunjang	Telah sesuai tujuan dan sasaran yang mendukung kegiatan pelaksanaan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pengawasan internal
3.	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : – KegiatanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah – Administrasi Keuangan Perangkat Daerah – Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah – Administrasi Umum Perangkat Daerah – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah – Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	96,98	Menunjang	Telah sesuai tujuan dan sasaran yang mendukung pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Inspektorat
		Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja	100					

Sumber *: E-Monev Bag Adpemb Setda Pemalang*

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan :

1. Pencapaian target kinerja Maturitas SPIP didukung oleh Kegiatan Pendampingan dan Asistensi. Kegiatan ini memiliki realisasi kinerja sebesar 90,3 dan masuk dalam kategori 'sangat tinggi'. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena kegiatan tersebut diperlukan untuk operasional penugasan pendampingan yang dilakukan kepada instansi pemerintah daerah.
2. Pencapaian target kinerja Kapabilitas APIP didukung oleh kegiatan:
    a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    Kegiatan ini memiliki realisasi Kinerja sebesar 78,36 dan masuk dalam kategori 'tinggi'. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena kegiatan tersebut diperlukan untuk peningkatan kompetensi SDM pemeriksa dan pengawas.
    b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    Kegiatan ini memiliki realisasi Kinerja sebesar 85,59 dan masuk dalam kategori 'tinggi'. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena kegiatan tersebut diperlukan untuk operasional penugasan audit di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dan target kinerja Akuntabilitas Kinerja didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini memiliki realisasi Kinerja sebesar 96,98 dan masuk dalam kategori 'sangat tinggi'. Pencapaian tersebut menunjang ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena kegiatan tersebut diperlukan untuk

meningkatkan manajemen kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.515.834.765	11.807.769.967	94,34%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	26.311.000	62,65%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.524.211.250	7.309.269.912	97,14%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	636.583.340	429.746.476	67,51%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	971.000.000	922.905.876	95,05%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.523.710.225	1.427.115.525	93,66%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.091.000	307.804.945	72,58%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.394.238.950	1.384.616.233	99,31%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.599.156.235	1.327.609.824	83,02%
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.380.976.235	1.129.538.405	81,79%
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	218.180.000	198.071.419	90,78%
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.052.472.000	906.286.499	86,11%
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	161.952.000	131.730.000	81,34%
11	Pendampingan dan Asistensi	890.520.000	774.556.499	86,98%

Sumber : *Sub bag PKU Inspektorat Pemalang*

Anggaran yang menunjang tercapainya 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 15.167.463.000 dan terealisasi sebesar Rp 14.041.666.290 atau 92,58%. Terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 1.125.796.710 atau sebesar 7,42%. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi pada pengadaan barang dan jasa, dimana harga

pasar barang yang direalisasi lebih rendah dari standar harga yang terpasang, tanpa mengurangi kualitas barang tersebut.

Sesuai data pada tabel di atas, anggaran tersebut terbagi dalam 3 (tiga) program dan 11 kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencatat capaian realisasi anggaran terbesar. Hal yang mendukung kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan barang dan jasa dapat berjalan optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan mencatat realisasi anggaran sebesar 83,02%. Hal yang mendukung kondisi tersebut, disebabkan kurangnya SDM untuk melaksanakan sub kegiatan Pengawasan Desa, sehingga anggaran sub kegiatan Pengawasan Desa tidak terserap optimal.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mencatat realisasi anggaran sebesar 86,11%. Hal yang mendukung kondisi tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan mandatory yang membutuhkan waktu tersendiri dan tidak ter-*cover* dalam Program Kerja Pengawasan 2024. Pekerjaan mandatory tersebut lebih diprioritaskan, sehingga penugasan pendampingan dan asistensi menjadi kurang optimal.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang dan Evaluasi terhadap Kinerja yang telah dicapai baik berupa Kinerja kegiatan, maupun Kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis Kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Pemalang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis, dengan realisasi 2 (dua) sasaran strategis mencapai target dan 1 (satu) sasaran strategis belum dapat mencapai target.
2. Sasaran yang sudah sesuai target :
   Sasaran strategis 2 : "*Meningkatnya kualitas hasil pengawasan*", dengan capaian Level 3.
   Sasaran strategis 3 : "*Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan*" dengan capaian sebesar 82,20.
3. Sasaran yang belum sesuai target :
   Sasaran strategis 1 : "*Terselenggaranya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel*" dengan capaian sebesar 2,935.
4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah :
   a. masih kurangnya jumlah SDM pengawas dan pemeriksa
   b. adanya pekerjaan mandatory yang bersifat mendadak dan perlu mendapat prioritas

c. masih kurangnya kompetensi SDM pengawas/pemeriksa.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Mengusulkan penambahan formasi untuk memenuhi kebutuhan SDM pengawas dan pemeriksa melalui pengadaan CPNS.
2. Mengatur strategi prioritas penugasan untuk menyikapi pekerjaan mandatory.
3. Memberikan waktu dan kesempatan pada personel untuk bebas dari tugas pengawasab selama beberapa waktu agar dapat mengikuti diklat kompetensi yang dibutuhkan guna mendukung kinerja pengawasan.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 12 Februari 2025
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

EDY SUSILO TEMU RAHARJO, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 005